

BAB I

PENDAHULUAN

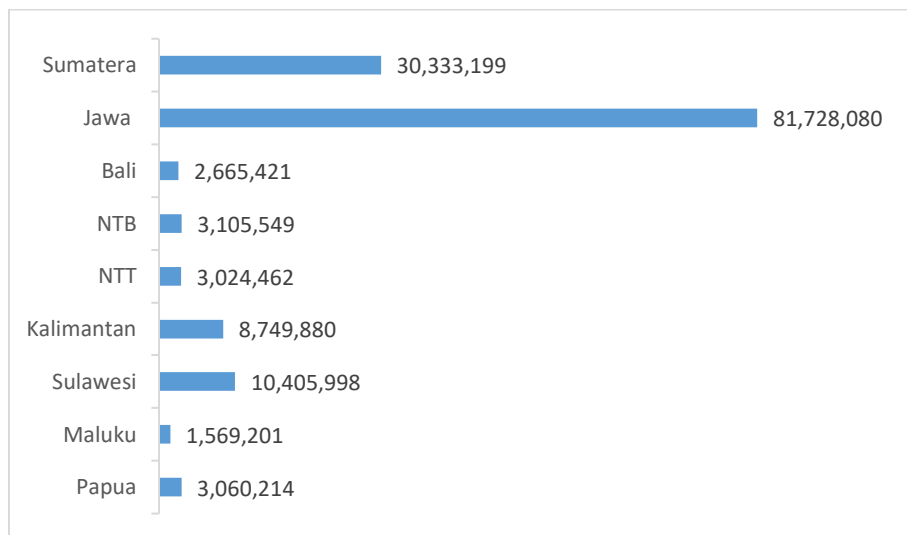
1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena berhubungan langsung dengan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, serta investasi (Nayyar, 2014). Dalam struktur perekonomian, tenaga kerja menjadi faktor produksi yang sangat menentukan, mengingat kontribusinya terhadap keberlangsungan sistem ekonomi secara keseluruhan. Tantangan ketenagakerjaan bukan hanya dialami Indonesia, melainkan menjadi persoalan global yang juga dihadapi negara maju maupun negara berkembang. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, tidak terlepas dari persoalan ketenagakerjaan khususnya terkait penyerapan tenaga kerja (Yanthiani, 2022). Pada tahun 2024, menurut katadata (2024) jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 283,49 juta jiwa, menempatkannya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia memegang peranan penting dalam mengukur kapasitas perekonomian nasional dalam menampung pertumbuhan penduduk usia produktif (Prihatini et al., 2020). Tingginya tingkat penyerapan tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan dalam menyediakan kesempatan kerja yang lebih merata, signifikansinya semakin terlihat di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, dan pergeseran kebutuhan industri

yang turut memengaruhi permintaan tenaga kerja (Felani & Ratnawati, 2023). Dari perspektif makroekonomi, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja berkontribusi pada kenaikan output nasional sekaligus menurunkan tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan bagi banyak wilayah di Indonesia (Nurlaila & Suhartono, 2024). Secara umum, dinamika angkatan kerja di Indonesia menunjukkan tren perbaikan setelah masa pandemi, meskipun fluktuasi tetap terjadi antarperiode dan antarwilayah.

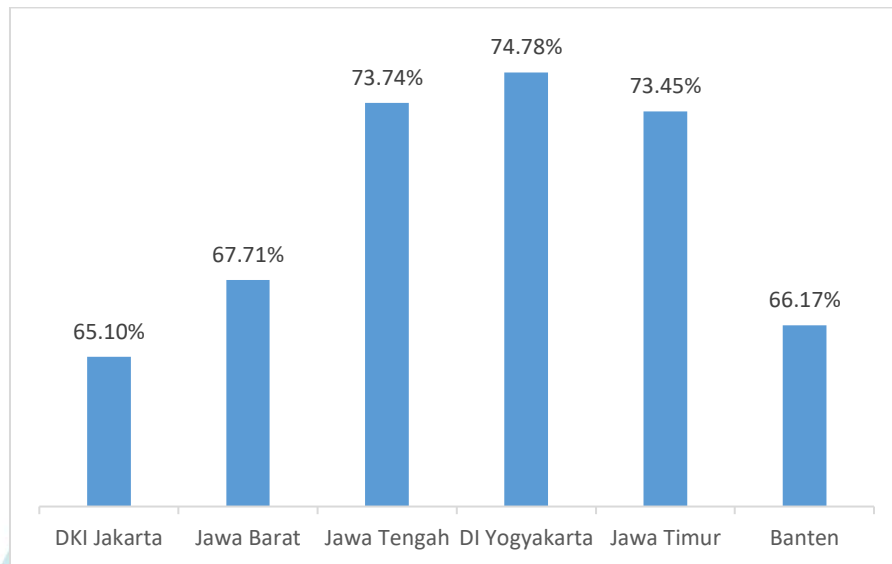
Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, karena kondisi tersebut berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nurfarkhana & Priadana, 2023). Ketika kesejahteraan dapat dinikmati secara merata, hal itu mencerminkan bahwa masyarakat yang bekerja memperoleh manfaat dari aktivitas pembangunan ekonomi. Pemerataan kesejahteraan tersebut dapat diamati melalui distribusi angkatan kerja yang tersebar secara proporsional di berbagai wilayah. Untuk menilai bagaimana persebaran angkatan kerja di Indonesia, perlu dilakukan pengamatan terhadap kondisi tenaga kerja pada seluruh pulau-pulau besar di negara ini (Louhenapessy, 2023). Data berikut menyajikan gambaran jumlah angkatan kerja per pulau di Indonesia pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 Data Angkatan Kerja Per Pulau di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 diatas, dapat disintesis bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 81.728.080 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan selisih yang sangat jauh dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya. Pulau Sumatera berada pada posisi kedua dengan 30.333.199 jiwa, sedangkan Pulau Sulawesi menyusul sebagai penyumbang ketiga terbesar dengan 10.405.998 jiwa. Sementara itu, wilayah lain seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil. Ketimpangan jumlah angkatan kerja antarwilayah tersebut menjadikan Pulau Jawa penting untuk dianalisis lebih mendalam. Pada bagian berikutnya disajikan data mengenai persebaran angkatan kerja di Pulau Jawa secara lebih rinci.



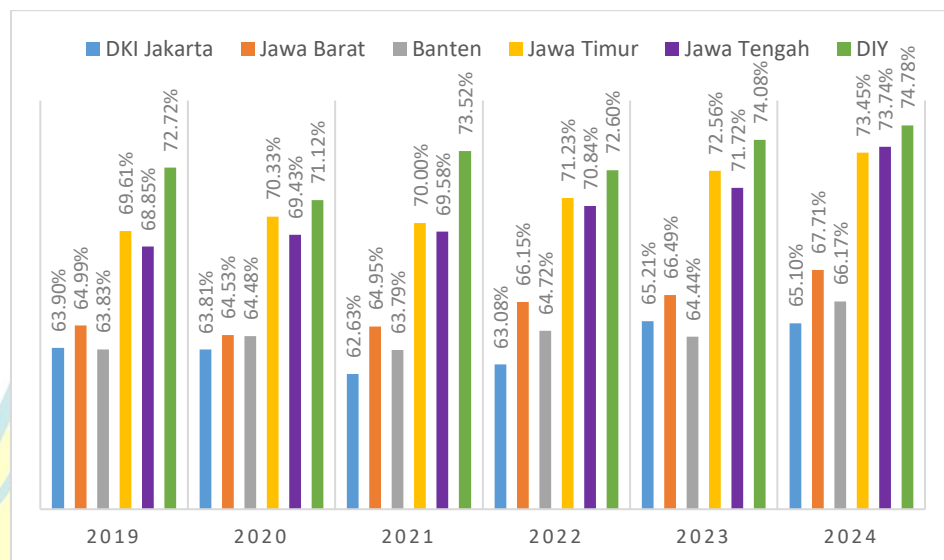
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.2 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) di Pulau Jawa Pada Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa provinsi dengan persentase angkatan kerja tertinggi adalah D.I Yogyakarta yang mencapai 74.78%. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Sebaliknya, persentase terendah tercatat pada provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 65.10%, diikuti oleh Banten dengan 66.17% dan Jawa Barat dengan 67.71%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nasional pada tahun 2024 sebesar 70,63%. Namun, TPAK di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih berada di bawah rata-rata tersebut, yang menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Fenomena di atas tentu menjadi permasalahan yang cukup menarik perhatian, karena dari ketiga provinsi tersebut termasuk provinsi-provinsi besar yang menjadi pusat perekonomian negara dan memiliki lapangan pekerjaan

serta jumlah penduduk yang cukup tinggi, tetapi angkatan kerjanya belum terserap dengan baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

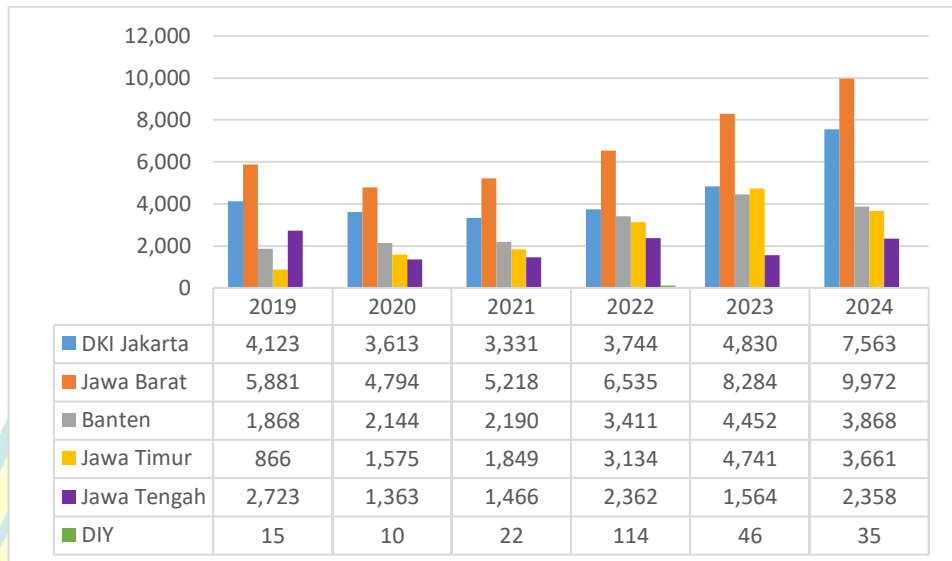
Gambar 1.3 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa seluruh provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, mengalami pola fluktuatif yang cukup jelas selama periode 2019-2024. Pada tahun 2020-2021, sebagian besar provinsi mengalami penurunan TPAK yang dipengaruhi oleh tekanan pandemi COVID-19. Namun, pada periode 2022-2024 terlihat adanya tren pemulihan di seluruh provinsi. Secara umum, provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur menunjukkan persentase TPAK yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, bahkan mencapai di atas 73% pada tahun 2024. Sementara itu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten cenderung memiliki tingkat TPAK yang lebih rendah, dengan DKI Jakarta sebesar 65,10%, Jawa Barat 67,71%, dan Banten 66,17% pada tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 69,80% pada tahun 2024, ketiga provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketiganya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia kerja dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Faktor berikutnya adalah investasi, merupakan salah satu variabel penting yang mampu mendorong perekonomian suatu daerah. Bentuk investasi dapat berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, memperluas kegiatan usaha yang sudah ada, atau menambah kapasitas produksi (Yuliana et al., 2019). Berbagai aktivitas tersebut akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa, memperluas kebutuhan tenaga kerja, serta mendorong kenaikan belanja dan pendapatan masyarakat (Nyoman et al., 2013). Investasi yang dimaksud meliputi PMA maupun PMDN, yang keduanya memberikan tambahan modal dan dukungan finansial bagi perekonomian daerah. Khususnya, investasi dalam negeri dinilai memiliki peran besar dalam memperkuat perekonomian negara berkembang. Ketika aliran investasi domestik meningkat, aktivitas ekonomi turut berkembang dan mampu

menciptakan peningkatan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Fadhillah et al., 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

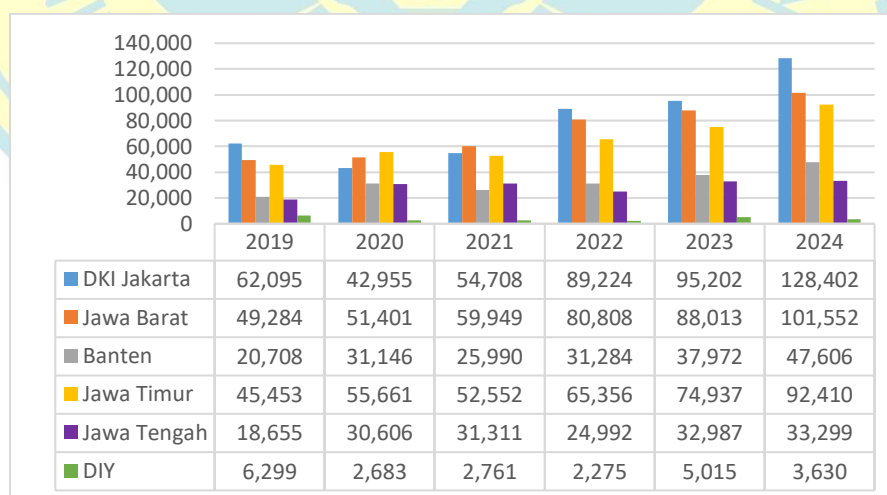
Gambar 1.4 Penanaman Modal Asing DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2019-2024 (Juta \$US)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan PMA di seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif selama periode 2019-2024, dengan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi PMA tertinggi, yang mencapai USD 9.972 juta pada tahun 2024, sementara nilai terendahnya terjadi pada tahun 2020 sebesar USD 4.794 juta.

Selanjutnya, DKI Jakarta juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar USD 7.563 juta, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020-2021. Sementara itu, Provinsi Banten mencatat nilai PMA yang fluktuatif dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar USD 4.452 juta, sebelum kembali menurun pada tahun 2024.

Di sisi lain, provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mengalami peningkatan PMA, meskipun nilainya masih berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten hingga tahun 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Jawa Tengah cenderung berfluktuasi dengan nilai yang relatif lebih rendah. Sementara itu, DI Yogyakarta memiliki nilai PMA yang paling kecil dibandingkan provinsi lainnya, yang mencerminkan skala investasi asing yang masih terbatas di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa investasi asing di Pulau Jawa masih terpusat pada provinsi dengan tingkat industrialisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi investasi antarwilayah, yang berpotensi memengaruhi perbedaan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja di masing-masing provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan pola yang cenderung meningkat meskipun disertai fluktuasi selama periode 2019–2024. Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai PMDN tertinggi, dengan puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp128.402 miliar, setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2020.

Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan nilai PMDN tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp101.552 miliar dan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp49.284 miliar. Sementara itu, Provinsi Banten mengalami peningkatan secara bertahap, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp47.606 miliar dan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp20.708 miliar.

Di sisi lain, provinsi seperti Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai PMDN yang terus meningkat hingga mencapai Rp92.410 miliar pada tahun 2024. Jawa Tengah menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun nilainya masih berada di bawah provinsi dengan aktivitas industri tinggi. Sementara itu, DI Yogyakarta memiliki nilai PMDN paling rendah dibandingkan provinsi lainnya, yang menunjukkan bahwa skala investasi domestik di wilayah tersebut masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, distribusi PMDN di Pulau Jawa masih terpusat pada provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan investasi antarwilayah,

yang berpotensi memengaruhi perbedaan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

Selain investasi, faktor selanjutnya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah dengan UMP tinggi (Jaya & Kholilah, 2020). Kenaikan UMP di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi seringkali membuat perusahaan menahan ekspansi karena beban biaya meningkat, apalagi jika tidak diimbangi kenaikan produktivitas (Widyapangestia & Soelistyo, 2022). Meski demikian, ketiga provinsi tersebut tetap menarik arus masuk pencari kerja dari berbagai daerah, sehingga kapasitas pasar kerja semakin terbatas dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan kebijakan UMP yang lebih komprehensif dengan memperhatikan struktur biaya industri, produktivitas, serta pola migrasi tenaga kerja antarwilayah (Sabia, 2015).

Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2019-2024 (Rupiah)

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Timur	Jawa Tengah	DIY
2019	3,940,973	1,668,373	2,267,990	1,630,059	1,605,396	1,570,923
2020	4,276,350	1,810,351	2,460,997	1,768,777	1,742,015	1,704,608
2021	4,416,187	1,810,351	2,460,997	1,868,777	1,798,979	1,765,000
2022	4,641,854	1,841,487	2,501,203	1,891,567	1,812,935	1,840,916
2023	4,901,798	1,986,670	2,661,280	2,040,244	1,958,170	1,981,782
2024	5,067,381	2,057,495	2,727,812	2,165,244	2,036,947	2,125,898

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 2019 hingga 2024. DKI Jakarta mencatatkan nilai UMP tertinggi yang mencapai lebih dari Rp5 juta pada tahun 2024, sementara provinsi lainnya seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, meskipun dengan tingkat yang lebih rendah.

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat UMP antarprovinsi yang cukup jelas, di mana provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi dan biaya hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki UMP yang lebih besar. DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki UMP tertinggi, sedangkan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki tingkat UMP yang relatif lebih rendah.

Dari sisi pekerja, kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli. Namun, dari sudut pandang pemberi kerja, kenaikan upah yang terus terjadi setiap tahun dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan ekspansi dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja di masing-masing provinsi.

Beragam penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Sejumlah studi menemukan bahwa investasi memiliki peran positif dalam memperluas kesempatan kerja. Widyapangestia dan Soelistyo (2022) membuktikan bahwa PMA dan PMDN berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja terserap di Pulau Jawa, meskipun besarnya pengaruh antarprovinsi berbeda. Hasil ini sejalan dengan Iksan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa investasi dan upah minimum secara simultan memengaruhi penyerapan tenaga kerja, serta penelitian Ramadhani dan Ananda (2024) di Jawa Barat yang menegaskan bahwa investasi mampu memperluas lapangan kerja bergantung pada struktur ekonomi daerah.

Namun, berbagai penelitian lain memberikan hasil yang berlawanan. Penelitian oleh Sitompul dan Simangunsong (2019) menemukan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional, sementara upah minimum hanya berdampak pada sektor tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian investasi lebih bersifat padat modal. Berikutnya penelitian oleh Tegep et al. (2019) juga melaporkan bahwa PMA maupun PMDN tidak signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat pengangguran maupun penyerapan tenaga kerja. Temuan internasional seperti penelitian Tintin (2012) pada negara OECD menunjukkan bahwa FDI cenderung berdampak negatif atau tidak signifikan terhadap employment,

sementara studi Safitri et al. (2023) di DKI Jakarta menekankan bahwa pengaruh PMA dan upah minimum sangat fluktuatif dan bahkan dapat bersifat negatif.

Dari sisi kebijakan upah minimum, pola ketidakkonsistenan juga muncul. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al. (2022) menemukan bahwa kenaikan UMP berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek. Pada kasus Serbia, Perić (2020) menyimpulkan bahwa FDI memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap penyerapan tenaga kerja dan tidak mampu meningkatkan rerata upah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Obeng (2015) di Ghana yang menunjukkan bahwa upah minimum maupun investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan, bukti empiris tersebut menegaskan bahwa dampak PMA, PMDN, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada karakteristik sektor, kondisi institusional, serta struktur pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah dan negara.

Dapat disintesis dari berbagai penelitian tersebut bahwa pengaruh PMA, PMDN, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja belum menunjukkan kesimpulan yang seragam. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa faktor struktural, karakteristik wilayah, serta jenis investasi sangat menentukan efektivitas kebijakan investasi dan upah minimum dalam menciptakan lapangan kerja.

Meskipun penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu mendapat

perhatian. Penelitian ini mengacu pada studi Isnaeni et al. (2024) yang menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan variabel Penanaman Modal Asing (PMA), padahal PMA memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah dengan tingkat industrialisasi tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih terbatas pada cakupan wilayah tertentu, sehingga belum mampu menggambarkan keterkaitan ekonomi antarprovinsi yang saling terintegrasi. Padahal, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan kawasan strategis dengan mobilitas tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang saling berhubungan. Di sisi lain, penelitian dengan rentang waktu pengamatan yang panjang masih relatif terbatas, padahal periode 2010–2024 mencerminkan dinamika ekonomi yang penting, termasuk perubahan struktural, peningkatan investasi, serta dampak dan pemulihan pascapandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan model penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel PMA, serta menggunakan cakupan wilayah dan periode waktu yang lebih komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang masih terdapat dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan permasalahan yang

telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai “Pengaruh PMA, PMDN Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun 2010-2024”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian ekonomi ketenagakerjaan melalui faktor investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta kebijakan upah minimum sebagai determinan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama periode 2010-2024.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024.
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama periode 2010-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam memahami keterkaitan antara investasi dan dinamika ketenagakerjaan di tingkat regional. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur mengenai penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, serta faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di ranah investasi dan ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan investasi (PMA dan PMDN) serta kebijakan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten periode 2010-2024.
2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berorientasi pada kemajuan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam memperbaiki dan mengembangkan kondisi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
3. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami isu terkait penanaman modal, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di ranah investasi dan ketenagakerjaan.